



# BPK Desak Pemda Respons Rekomendasi

■ Bupati Sintang Ucap Terimakasih

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Didi Budi Satrio meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan segera merespons rekomendasi pengelolaan keuangan yang diberikan pihaknya.

"Mengapa harus cepat, supaya dalam pengelolaan keuangan tersebut tidak ada kesalahan lagi. Semuanya bisa diselesaikan dengan peraturan dan perundangan-undangan," ujar Didi Budi Satrio kepada wartawan, usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDDT dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan semester II tahun 2014 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan, IIA Yani Pontianak, Kamis (22/1).

BPK RI Kalbar siap memberikan pendampingan kepada Pemda yang ingin mengelola keuangan dengan benar sesuai peraturan pemerintah.

"Kita siap membantu dan membimbing pemerintah daerah di Kalbar yang ingin belajar dalam mengelola keuangan yang benar, tuturnya.

Didi menyatakan, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDDT dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan semester II tahun 2014 ini merupakan keberhasilan oleh pemerintah Kalbar, dalam waktu yang singkat, ujar Wakil Gubernur Kalimantan Christyandy Sanjaya kepada wartawan.

Wagub menuturkan, pemerintah provinsi Kalbar telah menyerahkan LHP. Hasilnya akan dilihat bersama-sama dengan Gubernur Kalbar. "Bantuan kita menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada," jelasnya.

La menambahkan, kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan keuangan semakin efektif dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita harap ke depannya, pengelolaan keuangan pemerintah di Kalbar bisa berjalan dengan baik dan sesuai peraturan," ungkapnya.

Bupati Sintang Milton Crosby mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Kalbar yang telah membimbing selama ini kepada pemerintah daerah, dalam mengelola laporan keuangan.

"Mengapa harus cepat, supaya dalam pengelolaan keuangan tersebut tidak ada kesalahan lagi. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan."

DIDI BUDI SATRIO

Kepala BPK RI Kalbar

uang dengan baik. "Kami di daerah dalam pelaksanaan sering kali berbeda pandangan. Namun ketika tetap selalu satu meja, dalam mengelola laporan keuangan itu sendiri," ucapnya.

Milton berharap, laporan keuangan semakin baik dan akuntabel. "Kita bersyukur selama ini, kerjasama dengan BPK sangat baik. Maka dengan harapan, BPK terus memberikan arahan dalam tanggungjawab keuangan.

Sehingga kami terus memperbaiki laporan keuangan. Serta kualitas laporan keuangan dan kinerja harus semakin baik," tuturnya. (ru)

## Jangan Malu

oleh pemerintah. "Makanya apapun temuan dari BPK, wajib didukung dan ditindaklanjuti," tuturnya.

Budi berharap pemerintah daerah terus memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) supaya lebih paham mengelola keuangan pemerintah.

"Kalau memang kurang mengerti atau paham, jangan malu untuk belajar. Saya rasa BPK siap untuk membantu dan membimbing bagaimana mengelola laporan keuangan dengan baik," ungkapnya. (ru)

PERWAKILAN DPRD se-Kalbar yang juga Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus menyatakan, satu di antara fungsi DPRD adalah mengontrol pemerintah dalam menjalankan program. "Pastinya kami sangat mendorong, apabila ada temuan dari BPK dilapangan untuk ditindaklanjuti," ucapnya.

Menurutnya, perlu didukung dalam hal bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Supaya pemerintah daerah bisa bekerja sesuai dengan aturan, telah ditetapkan